

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Amiruddin, (2010), *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing,

Harahap, M. Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap Yahya M., (2007), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika,

Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana (Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana di Indonesia*. Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University.

Mulyadi Lilik, (2007), *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

Purba Hutapea. (2022). *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Rahardjo, Satjipto. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Salam Faisal Moch., (2001), *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Salman, Otje & Susanto, Anthon F. (2008). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Santoso, Topo. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafridatati, dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

Umar, Musni & Ilyas, Syukri. (2004). *Lembaga Pencegah Korupsi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982

Jurnal

Bahrn, (2017), PENETAPAN TERSANGKA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 17(2), 220-239

Paath, V., Bawol, H., & Sepang, R. (2022). Alasan dalam melakukan penangkapan dan penahanan atas dasar bukti permulaan yang cukup menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 10(3). 1-10

Ramadhan, R. N. (2022). Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Lapor Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 40–58.

Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Kosmik Hukum*, 18(1).
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2338>

Siregar, R. (2020). Pengacara sebagai penjaga keadilan dalam masyarakat. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 8(1), 75–89.